IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (Studi Komparatif Pada Taman Kanak-Kanak yang Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan)

Mega Pardosi, Widyakanti, M. Nur Iman Ridwan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Lambung Mangkurat

Abstract

Early Childhood Education Programs is a government way to create human resources are ready to compete in the era of globalization. The purpose of this research is to find (1) the implementing of early childhood education programs, especially in Mantui Village, Sub-district South Banjarmasin, and (2) what are the constraints of implementing process. The result of research is (1) implementation early childhood education there are not according to the standards listed in Permendiknas No.58 tahun 2009, and based on the results in the field, accredited kindegarten, the implementation is not accordance with the standards of early childhood education.(2) The most common of constraints is, human resources like most teachers have not scholar, and another constraint is facilities communication and information ,and infrastructure. The research recommend to(1) Banjarmasin Education Office :requiring teachers to graduate, not only for public servant but also private. (2) Kindergarten principal:giving priority to data management. (3) Kindergarten teachers : take more training provided by the government.

Keywords : *Implementation, Early childhood Education, Kindergarten*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan senjata utama dalam membangun sumber daya manusia yang siap bersaing di era globalisasi. Seperti halnya membangun sebuah bangunan, hal pertama yang dilakukan adalah memperkokoh pondasi bangunan tersebut agar tidak mudah goyah. Begitu juga pada pendidikan, sedini mungkin perlu diterapkan pendidikan untuk membangun sumber daya manusia yang berkompeten dan siap berjuang di era globalisasi. Pemerintah melaksanakan sebuah program pendidikan anak usia dini (PAUD), yang tercantum dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1, Butir 14 menyatakan bahwa "Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut".

Program PAUD adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (Koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir,daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual) sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Ada dua tujuan penyelenggaraan program PAUD, yaitu tujuan utamanya untuk membentuk anak indonesia yang berkualitas, yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal didalam memasuki pendidikan dasar serta mengurangi kehidupan di masa dewasa. Dan tujuan pelengkapnya adalah untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan (akademik) di sekolah.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 28, bahwa:

1. Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar
2. Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal
   a. PAUD jalur pendidikan formal: TK, RA atau bentuk lain yang sederajat
   b. PAUD jalur pend non formal: KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat
   c. PAUD jalur pend informal: pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengeluarkan empat kebijakan mengenai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kebijakan pertama adalah penataan kelembagaan. Dimana hal ini penting dilakukan karena pemerintah hanya akan memberikan bantuan pada institusi

PAUD yang resmi, jelas keberadaan dan pelaksanaannya. Kedua, terkait tutor pendamping dan guru yang berpartisipasi dalam proses belajar mengajar di PAUD harus disiapkan standarnya tidak hanya kualifikasi pendidikan, tetapi juga dari kompetensinya dan hal ini akan diatur dalam undang-undang. Ketiga, kebijakan yang terkait dengan konten, isi dan bahan ajar. Kurikulum PAUD jelas tidak sama dengan kurikulum yang ada pada pendidikan dasar. Sangat penting jika kegiatan dalam PAUD diisi dengan kegiatan yang merangsang reaksi fisik dan pengenalan lingkungan. Terakhir kebijakan PAUD yang ke empat adalah ketersediaan

sarana dan prasarana untuk proses belajar dan mengajar.

Sejak tahun 2009 dimana pemerintah mulai mengembangkan pendidikan bagi anak usia dini yang ditandai dengan sejumlah bantuan dana yang di alirkan untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan PAUD di masyarakat. Namun bantuan permerintah tersebut masih belum seimbang dengan jumlah lembaga PAUD yang ada. Banyak sekali lembaga PAUD didirikan yang masih belum memenuhi standar, belum jelas keberadaan dan pelaksanaannya.

Di Banjarmasin sendiri terdapat 400 Lembaga PAUD yang terdiri dari 273 Taman Kanak-Kanak (TK), 104 Kelompok Bermain (KB), 22 Tempat Penitipan Anak (TPA), dan 1 Satuan Paud Sejenis (SPS). Dan di kecamatan Banjarmasin selatan terdapat 79 lembaga PAUD yang terdiri dari 58 Taman Kanak-kanak (TK), 17 Kelompok Bermain (KB), 3 Taman Penitipan Anak (TPA), dan 1 Satuan Paud Sejenis (SPS), seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Data PAUD Kecamatan Banjarmasin Selatan

JENIS KEGIATAN	JUMLAH LEMBAGA	PENDIDIK	PESERTA DIDIK
Taman Kanak-kanak (TK)	58	281	3461
Kelompok Bermain (KB)	17	75	611
Taman Penitipan Anak (TPA)	3	22	166
Satuan PAUD Sejenis (SPS)	1	2	19
JUMLAH	79	380	4246

Sumber : data Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, 2013

Dari ke empat jenis PAUD, Jumlah lembaga Taman Kanak-kanak (TK) lebih banyak dari lembaga lainnya,lembaga TK merupakan PAUD jalur pendidikan formal, sedangkan jenis lembaga PAUD lainnya Non formal dan Informal. TK merupakan Jalur pendidikan formal paling bawah sebelum ketingkat SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Selain itu materi yang ada pada TK lebih banyak pembelajaran. Berbeda dengan KB, TPA dan SPS yang lebih banyak bermain. Peneliti memfokuskan hanya pada lembaga PAUD jalur formal (TK), dimana sebagian besar masyarakat lebih memilih memasukan anaknya ke Taman Kanak-kanak hal ini terkait dengan standar PAUD yang pertama yaitu tingkat pencapaian perkembangan hal tersebut dapat dilihat dari nilai akreditasi setiap lembaga. Lembaga PAUD yang memiliki akreditasi baik dapat dikatakan lembaga tersebut telah berkembang dengan baik.

Tabel 1.2 Data PAUD Kecamatan Banjarmasin Selatan per Kecamatan

No.	Kelurahan di Banjarmasin Selatan	Jenis PAUD					Jumlah Akreditasi			
		TK	KB	TPA	SPS	Jumlah	A	B	C	Tidak Terakredita
1.	Pemurus Dalam	12	2	-	-	14	2	6	2	4
2.	Pemurus Luar	1	-	-	-	1	1	-	-	-
3.	Pemurus Permai	1	1	1	-	3	-	3	-	-
4.	Pemurus Baru	6	4	1	-	11	1	3	-	7
5.	Kelayan Dalam	4	-	-	1	5	2	1	-	2
6.	Kelayan Timur	6	1	-	-	7	-	2	2	3
7.	Kelayan Barat	3	2	-	-	5	1	2	-	2
8.	Kelayan Selatan	3	2	-	-	5	-	-	1	4
9.	Kelayan Tengah	3	1	-	-	4	1	2	-	1
10.	Pekauman	3	1	-	-	4	1	1	1	1
11.	Murung Raya	3	-	-	-	3	-	1	-	2
12.	Basirih Selatan	4	1	1	-	6	-	-	2	4
13.	Mantuil	7	1	-	-	8	-	3	2	3
14.	Tanjung Pagar	2	-	-	-	2	-	-	2	-
15.	Komp. Banjar indah permai	-	1	-	-	1	-	-	-	1
JUMLAH		58	17	3	1	79	9	24	12	34

Sumber : data Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, 2013

Tabel 1.3 Data PAUD (TK) di Kecamatan Banjarmasin Selatan

No.	Kelurahan di Banjarmasin Selatan	Nilai Akreditasi lembaga TK				
		A	B	C	Tidak Terakreditasi	Jumlah
1.	Pemurus Dalam	2	5	2	3	12
2.	Pemurus Luar	1	-	-	-	1
3.	Pemurus Permai	-	1	-	-	1
4.	Pemurus Baru	1	3	-	2	6
5.	Kelayan Dalam	2	1	-	1	4
6.	Kelayan Timur	-	2	2	2	6
7.	Kelayan Barat	1	2	-	-	3
8.	Kelayan Selatan	-	-	1	2	3
9.	Kelayan Tengah	1	2	-	-	3
10.	Pekauman	1	1	1	-	3
11.	Murung Raya	-	1	-	2	3
12.	Basirih Selatan	-	-	2	2	4
13.	Mantuil	-	3	2	2	7
14.	Tanjung Pagar	-	-	2	-	2
JUMLAH		9	21	12	16	58

Sumber : data Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, 2013

Berdasarkan tabel diatas jumlah lembaga PAUD yang belum terakreditasi sebanyak 34 lembaga (44%). Terutama untuk lembaga PAUD (TK), karena TK termasuk pendidikan jalur formal, dan dianggap penting untuk sebuah lembaga seperti TK memiliki akreditasi.

Dari tabel diatas jumlah TK di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang belum terakreditasi sebanyak 16 lembaga. Di Kelurahan Mantuil terdapat 7 lembaga PAUD (TK) diantaranya 3 yang berakreditasi B, 2 yang berakreditasi C dan 2 yang tidak terakreditasi. Dari data tersebut menggambarkan bahwa ada lembaga PAUD yang berakreditasi baik, sementara yang lainya masih kurang atau bahkan belum terakreditasi. Peneliti mengambil 3 objek penelitian yang pertama adalah TK yang berakreditasi B

yaitu TK Intan Wengga Sari, yang berakreditasi C yaitu TK Baitturahman, dan yang belum terakreditasi yaitu TK An-Nisa. Peneliti memilih 3 TK tersebut karena merupakan TK yang tahun berdirinya masih terbilang baru diantara TK lainnya yang ada di Mantuil. Terkait kebijakan kedua mengenai standar lembaga PAUD mengenai tutor pendamping dan guru yang berpartisipasi dalam proses belajar mengajar di PAUD harus disiapkan standarnya tidak hanya kualifikasi pendidikan. Adapun pada lembaga PAUD jalur pendidikan formal yaitu Taman Kanak-kanak dimana tenaga pendidik seperti Guru TK, kualifikasi akademik dan kompetensinya meliputi :

a. Kualifikasi Akademik
   Memiliki ijazah S1 atau D-IV jurusan pendidikan/ Psikologi anak yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi
b. Kompetensi

- Memiliki kompetensi kepribadian
- Memiliki kompetensi profesional
- Memiliki kompetensi pedagogik
- Memiliki kompetensi sosial

Dalam hal ini tenaga pendidik dituntut paling tidak bergelar S1. Namun sampai saat ini tenaga pendidik dan kependidikan PAUD masih banyak yang belum bergelar sarjana seperti Pulau Jawa, demikian halnya dengan Kalimantan selatan tepatnya di Banjarmasin, dalam sebuah surat kabar, Kepala Dinas Pendidikan Kalsel Ngadimun mengatakan jika di Kalsel pun kualitas guru Paud/TK yang sarjana masih minim, terutama di daerah-daerah bukan perkotaan . (*Bpost, Jumat 25 oktober 2013*).

Dalam artikel Bpost diatas menyatakan bahwa kebanyakan lembaga PAUD yang tenaga pendidiknya sangat minim bergelar sarjana ada pada daerah-daerah bukan perkotaan. Menariknya, Banjarmasin dapat dikatakan merupakan kota yang perkembangannya lebih maju dari kota-kota lainnya yang berada di Kalimantan Selatan juga, namun banyak tidak diketahui masyarakat bahwa masih banyak terdapat daerah-daerah pinggiran yang belum terlalu mendapat perhatian pemerintah Banjarmasin, dalam penelitian ini peneliti memilih daerah Mantuil, Mantuil merupakan daerah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan kota Banjarmasin. Mantuil dapat dikatakan termasuk daerah yang masih membutuhkan perhatian pemerintah, dimana seperti contoh kasus Desa Jemaah di Mantuil yang masih belum mendapat penerangan berupa listrik, ada sekitar 30 kepala keluarga yang masih menggunakan lampu teplok. (*Bpost, Rabu 18 september2013)*

Dari contoh kasus tersebut dapat dikatakan daerah Mantuil, meskipun bagian dari kota yang perkembangannya baik,

namun masih menjadi daerah pinggiran, karena masih minim perhatian pemerintah terhadap perkembangan daerah tersebut. Berkaitan dengan proses Implementasi program PAUD, Hal tersebut menarik peneliti untuk meneliti bagaimana implementasi program PAUD diKelurahan Mantuil dengan lembaga yang memiliki nilai akreditasi berbeda padahal masih berada dalam daerah yang sama, yang dapat dikatakan pinggiran.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Anderson dalam Agustino (2006:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang di usulkan atau dimaksud. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

Idealnya suatu kebijakan publik menurut Pasolong (2013:39) adalah (1) Kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk rill, bukan untuk sekedar dinyatakan, (2) Kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.

Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan menurut Gordon dalam Pasolong (2013:57) adalah berbagai kegiatan yang di arahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterprestasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut Agustino (2006:138), implementasi kebijakan dalam praktiknya merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Dari pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses pencapaian yang dilakukan aktor terkait dari apa yang telah dirumuskan. Terkait dengan penelitian ini implementasi kebijakan adalah pelaksanaan program PAUD (TK) di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sesuai dengan peraturan Menteri pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, standar pendidikan anak usia dini meliputi pendidikan formal dan nonformal yang terdiri atas :

a. Standar tingkat pencapaian perkembangan
b. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
c. Standar isi, proses dan penilaian
d. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk menjelaskan secara lebih mendalam masalah bagaimana implementasi kebijakan program PAUD yang ada di Kota Banjarmasin, penelitian ini lebih memfokuskan kepada lembaga PAUD yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif komparatif. Dimana Penelitian ini dimaksudkan untuk menyajikan gambaran yang lengkap mengenai setting sosial beserta hubungan-hubungannya yang terdapat dalam penelitian dan penelitian bersifat komparatif.

Lokasi penelitian ini adalah Lembaga-lembaga PAUD di Kelurahan. Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan, alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena Kelurahan Mantuil termasuk daerah pinggiran perkotaan dengan variasi akreditasi PAUDnya. Dalam pemilihan subjek penelitian, peneliti menggunakan purposive sampling, dimana peneliti menentukan kategori-kategori dalam memilih informan. Sumber Data dalam penelitian ini diperoleh dari Data primer berupa hasil wawancara peneliti dengan informan dan analisis terhadap hasil wawancara tersebut. Dan Data sekunder yang berupa dokumen, laporan-laporan mengenai lembaga PAUD tersebut.

Metode Pengumpulan Data pada penelitian ini meliputi berbagai cara, diantaranya Observasi, Wawancara/Interview, Dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas seperti model dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:246) dalam menganalisis data terdiri dari 4 tahap yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, adapun tahap-tahap tesebut yaitu :

Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak

Tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu. Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional.

Berdasarkan hasil penelitian di 3 Taman Kanak-kanak yang memiliki nilai akreditasi berbeda-beda, pertama di TK Intan Wengga Sari yang memiliki Akreditasi B dimana dari hasil laporan data perkembangan dilihat dari aspek nilai-nilai agama dan moral, konsep bentuk, warna, ukuran dan pola dan sosial emosional , seperti salah satu contohnya menunjuk kumpulan benda menunjukan anak mulai berkembang dan 2 diantara 29 murid sudah berkembang sesuai harapan. Dan dari hasil pengamatan peneliti ketika murid TK Intan Sari Wengga diberi tugas untuk memberi warna dan mengelompokkannya masih ada beberapa anak yang kurang memahami. Selain itu di TK Intan Sari Wengga masih banyak orang tua yang ikut masuk belajar bersama anak, bahkan dari pengamatan peneliti orangtua ikut terlibat dalam mengerjakan tugas anak.

Pemandangan serupa juga terlihat di TK Baiturrahman dimana pada saat proses belajar mengajar berlangsung masih banyak anak yang didampingi oleh orangtuanya, tugas pun tidak sepenuhnya merupakan hasil jerih payah anak sendiri.

Berbeda dengan TK An-Nisa , dari data laporan perkembangan anak menunjukan bahwa 3 diantara 22 murid yang berhadir pada saat itu, 1 orang anak sudah mulai berkembang dan 2 diantaranya berkembang sesuai harapan. Dan saat peneliti turun lapangan untuk meneliti, terlihat bahwa anak-anak dapat mengerjakan tugas dari guru dengan baik, semuanya aktif mengerjakan. Dan murid-murid TK An-Nisa pun terihat sangat mandiri tanpa ada yang merengek minta didampingi oleh orangtuanya.

Dari ke tiga lembaga TK diatas menunjukan bahwa tingkat pencapaian dari data laporan perkembangan anak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan peraturan pemerintah. Seperti dalam Permen no.58 tahun 2009 mengenai tingkat

pencapaian perkembangan anak usia 4 - <5tahun pada lingkup perkembangan Konsep bentuk, warna, ukuran dan pola : Mengklasifikasikan benda berdasarkan bentuk atau warna atau ukuran. Namun dalam lingkup sosial emosional : menunjukan sikap mandiri dalam memilih kegiatan masih banyak yang belum bisa dilakukan oleh murid-murid TK Intan Wengga Sari dan TK Baiturrahman.

Teori attachment yang dimaksud adalah keteraturan, kesenangan, keinginan untuk melekat terhadap orang yang di akrabinya. Hal ini sesuai dengan pengamatan peneliti ketika melihat masih ada anak yang tidak mau ditinggalkan orangtuanya ketika mulai pelajaran dikelas. Lanjut lagi Menurut Bowlby anak yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh hubungan sosial dengan orang lain akan mempengaruhi perkembangan sosial anak. Bila anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan hubungan anak dengan lingkungan sosial selama periode bayi, maka mungkin hubungan sosial anak menjadi menyimpang setelah dewasa. Dari pendapat Bowlby tersebut sangat berdampak buruk bagi perkembangan anak, maka dari itu perlu adanya kemandirian anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah.

Peneliti memilih untuk mengamati kelas nol besar karena dari murid nol besar akan terlihat bagaimana perkembangan anak selama melewati nol kecil. Seperti halnya saja terlihat pada saat orangtua ikut masuk kekelas mendampingi anak-anaknya, jikalau si anak masih di kelas nol kecil, masih dapat dimaklumi karena si anak baru beradaptasi dengan lingkungannya. Namun anak kelas nol besar kurang dapat dimaklumi karena harusnya sudah terbiasa dan mulai belajar mandiri. Namun ternyata masih banyak yang menangis jika tidak didampingi orangtuanya.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik anak usia dini adalah profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.

Berdasarkan kualifikasi akademik pendidik menurut permendiknas no 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yaitu Bagi guru PAUD jalur pendidikan formal (TK, RA, dan yang sederajat) harus memiliki pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang PAUD atau Psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Dan yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi disebut Guru pendamping dan pengasuh. Dari hasil penelitian di TK Intan

Wengga sari terdapat 3 orang pendidik dan 2 diantaranya masih dalam tahap proses menuju sarjana sedangkan 1 orang masih lulusan SMA. Di TK An-Nisa tenaga pendidik berjumlah 8 orang 2 diantaranya sudah sarjana dan 6 orang lainnya masih lulusan SMA. Di TK Baiturrahman berjumlah 4 orang, 1 orang sudah bergelar sarjana, 2 orang masih dalam tahap penyelesaian kuliah S1 dan 1 orang masih SMA.

Dan dari hasil wawancara sebagian pengajar mengatakan bahwa untuk guru TK swasta tidak diwajibkan sarjana, dan sebagian pengajar lainnya mengatakan hal sebaliknya. Dan menurut pendapat Kasi kelembagaan dan kurikulum PAUD di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin bahwa memang benar untuk guru TK swasta tidak diwajibkan sarjana, namun sangat di anjurkan.

Dari standar PAUD dalam Permendiknas no.58 tahun 2009 tidak disebutkan apakah yang diwajibkan hanya TK negeri atau tidak. Kalau menurut standar PAUD maka TK Intan Wengga Sari dan TK An-Nisa masih belum memenuhi standar, karena jumlah pengajar yang sarjana masih sedikit, untuk yang tidak memenuhi kualifikasi akademik biasanya disebut guru pendamping, namun di kedua TK ini guru pendamping pun dapat mengajar murid sendirian.

Dan untuk tenaga kependidikannya seperti kepala sekolah di TK Intan Wengga Sari dan Baiturrahman sudah memenuhi kualifikasi pendidik dimana minimal D-IV atau S1, sedangkan di TK An-Nisa kepala sekolanya masih lulusan SMA. Namun dari keterangan kepala PAUD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, hal tersebut di perbolehkan karena swasta diangkat oleh yayasan. Dan hal tersebut sudah menjadi resiko yayasan yang mengangkat orang tersebut menjadi kepala sekolah. Dalam hal pengawasan, pengawas berasal dari Dinas Pendidikan yang ada di tiap Kecamatan.

Menurut teori Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:146) membatasi Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dari teori tersebut tidak mesti yang langsung dari pemerintah atau swasta, karena sama-sama menjalankan program kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, maka seharusnya swastapun mengikuti peraturan yang sama, tidak hanya

diwajibkan untuk negeri. Seperti halnya pada kualifikasi pendidikan guru PAUD, tidak terkecuali negeri ataupun swasta karena program tersebut memiliki tujuan yang sama.

Standar isi, proses, dan penilaian

Standar isi, proses dan penilaian meliputi struktur program. Alokasi waktu dan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dilaksanakan secara terintegrasi/terpadu sesuai dengan tingkat perkembangan, bakat/minat dan kebutuhan anak. Standar ini yang mempertimbangkan potensi dan kondisi setempat, sehingga dimungkinkan terjadinya perbedaan kegiatan dan pelaksanaan pendidikan, pengasuhan dan perlindungan dilapangan.

Ketiga TK menetapkan materi persemesternya sesuai tema, dan sudah ditetapkan jadwal masing-masing tema. Perencanaan proses belajar mengajar terangkum dalam RKH (rencana kegiatan harian) dan RKM (rencana kegiatan mingguan). Sedangkan waktu proses pembelajaran dari ketiga TK berbeda-beda, untuk TK Intan Sari Wengga total waktu pertemuan di mana 5 hari kerja senin-jumat selama 800menit seminggu. Sedangkan untuk TK An-Nisa menerapkan jadwal 6 hari kerja senin-sabtu, total waktu petemuan selama 1 minggu adalah 960 menit, dan untuk TK Baiturrahman selama 6 hari kerja total pertemuan selama 1 minggu 900menit. Ketiga TK tersebut sudah memenuhi standar dalam alokasi waktu pertemuan , dimana antara 150-180menit dalam sekali pertemuan. Dan untuk penentuan hari kerja dalam seminggunya 5-6 hari kerja. Untuk penilaian masing-masing TK melaporkannya dalam laporan perkembangan anak, setiap harinya yang nantinya akan dirangkum pada akhir semester sebagai hasil akhir yang akan dicantumkan dalam raport. Dari ketiga lembaga TK di atas sudah memenuhi standar isi, proses dan penilaian.

Standar Sarana dan Prasarana, Pengelolaan dan Pembiayaan

Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pelayanan PAUD. Standar sarana dan prasarana meliputi jenis, kelengkapan, dan kualitas fasilitas yang digunakan dalam menyelenggarakan proses penyelenggaraan PAUD

Di TK Intan Wengga Sari sarana dan prasarana sangat minim sekali, seperti alat bermain hanya 1, alat permainan edukatif pun tidak seberapa di ruang kelas, setiap ruangan kelas desainnya sangat kosong dan kurang menarik, padahal hal tersebut dapat mempengaruhi pada

pengembangan konsep anak. Selain itu, sarana belajar seperti meja jarang dipakai, meskipun tidak ada kursi, seharusnya jangan sampai membiarkan anak mengerjakan tugas dengan tengkurap. Menurut pengamatan peneliti fasilitas yang disediakan sangat minim. Selain itu ruang kantor kepala sekolah tidak tertata rapi, tidak ada meja dan kursi tamu. Untuk sistem pengelolaan yang diterapkan TK Intan Wengga Sari menurut peneliti tidak teratur, seperti data lembaga, media belajar dan semacamnya tidak di perhatikan dengan benar-benar, bahkan kepala sekolah mempunyai prinsip enggan untuk meminta bantuan pada pemerintah. pembiayaan yang diperoleh lebih banyak dari yayasan. Biaya pendaftaran yang ditentukan dari sekolah adalah 650 ribu, dan kemungkinan akan meningkat setiap tahunnya.

TK An-Nisa memiliki sarana dan prasarana yang memadai dimana memiliki 2 alat bermain, 3 ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi selain itu TK An-Nisa memiliki banyak Alat permainan Edukatif, hal ini sangat membantu mengembangkan konsep anak. TK An-Nisa berdiri tahun 2010, namun bangunannya masih sangat baru, karena ini merupakan bangunan kedua setelah sebelumnya berada di seberang dari tempat yang sekarang kemudian pindah. Untuk pengelolaan data lembaga dan sumber belajar dan fasilitas lainnya pihak TK An-Nisa sangat bagus dalam mengelola, karena menurut pengamatan peneliti ruang kelas dan kantor sangat diperhatikan kelengkapan fasilitasnya. Pembiayaan yang dipakai lebih banyak menggunakan biaya investasi dimana diperoleh dari yayasan, dan biaya pendaftaran yang ditetapkan untuk murid yang baru masuk adalah 750ribu , namun lengkap dengan seragam dari senin-sabtu dan buku-buku.

TK Baiturrahaman tidak jauh berbeda dengan TK An-Nisa , kelengkapan sarana dan prasarana sangat memadai, memiliki 3 alat bermain, dalam setiap ruang kelas berisi meja-meja yang disusun 3 baris meskipun tanpa kursi. Dalam ruangan pun sangat menarik penuh dengan alat permainan edukatif yang tersusun rapi dalam lemari. Bangunan TK Baiturrahman sebelumnya pernah direnovasi
pada tahun 2008. Untuk pengelolaan data lembaga sangat tersusun, dimana ruang kantor sangat rapi , dan untuk pengelolaan sumber belajar, pihak TK An-Nisa sering mengajukan proposal untuk meminta bantuan sumbangan APE (alat permainan edukatif). Pembiayan tidak jauh berbeda dengan 2 TK lainnya dimana lebih banyak

menggunakan biaya investasi yang diperoleh dari yayasan.

Dari ketiga TK diatas yang kurang memenuhi standar untuk sarana dan prasarana adalah TK Intan Wengga Sari. Tk intan Wengga Sari merupakan TK yang lebih dulu berdiri namun, dilihat dari pengembangan sarana dan prasarana masih kurang, berbeda dengan TK An-Nisa yang terbilang masih sangat baru, begitupun TK Baiturrahman tahun berdirinya sama dengan TK Intan Sari wengga, namun TK Baiturrahman lebih maju dalam hal sarana dan prasarana.

Akreditasi merupakan identitas penting untuk sebuah lembaga TK untuk menilai lembaga tersebut bagus atau tidaknya. Namun dari akreditasi tidak dapat menilai secara keseluruhan lembaga tersebut benar-benar bagus. Seperti halnya penelitian yang dilakukan peneliti, jika melihat dari data PAUD yang didapat dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tidak sama seperti hasil yang didapat oleh peneliti dari lapangan.

Pertama, lembaga PAUD TK Intan Wengga Sari dari Data PAUD yang didapat TK Intan Wengga Sari nilai akreditasnya adalah B, dan dari hasil wawancara peneliti mengetahui bahwa TK Intan Wengga Sari sudah 2 kali memperoleh nilai B. Adapun syarat penilaian akreditas yang bisa dilihat adalah pembukuannya, satuan program individu dari pengajar, administrasi, sarana prasarana dan latar belakang pendidiknya. Dari beberapa syarat tersebut sarana prasarana TK Intan Wengga Sari yang paling tidak memadai. Sedangkan TK

Baiturrahman nilai akreditasnya C namun sarana dan prasarananya jauh lebih memadai dari TK Intan Wengga Sari. Untuk latar belakang pendidiknnya 3 orang pendidik sarjana dengan jurusan PAUD, hal tersebut menjadi nilai lebih untuk TK Baiturrahman dari pada TK Intan Wengga Sari. Kemudian TK An-Nisa sampai sekarang belum memperoleh nilai akreditasi karena lembaga tersebut lumaya masih baru, namun jika dilihat dari latar belakang pendidiknya hanya 2 orang yang sarjan dan 6 orang lainnya masih SMA. Sedangkan untuk sarana prasarana nya sangat memadai.

Hal ini menunjukan bahwa nilai akreditasi yang didapat dari Data PAUD tidak sesuai dengan temuan dilapangan. Seperti halnya TK Intan Wengga Sari tidak sesuai dengan nilai akreditasinya yang “Baik” , begitupun sebaliknya dengan TK Baiturrahman yang nilainya Cukup, malah harusnya sudah Baik.

Kendala-Kendala Implementasi Program PAUD

Dari ketiga lembaga TK kendala yang paling utama berkaitan dengan teori dari Edwards ada beberapa faktor implementasi yang menimbulkan adanya

kendala-kendala dalam implementasi. Yang pertama munculnya kendala karena kurangnya komunikasi, dimana pelaksana keputusan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, seperti yang dilakukan kepala sekolah TK Intan Wengga Sari yang sama sekali tidak mau meminta bantuan dari pemerintah dalam upaya pengembangan belajar mengajar murid-muridnya. Selanjutnya yang menjadi faktor munculnya kendala adalah sumber-sumber. Sumber yang dimaksud disini seperti sumber belajar yang kurang memadai dapat menyebabkan kurangnya efektifitas dalam belajar. Selain itu kendala yang berkaitan dengan komunikasi adalah mengenai guru pengajar yang diwajibkan sarjana, di TK An-Nisa banyak guru pengajarnya yang belum sarjana dan mengaku bahwa TK swasta tidak diwajibkan dan mengungkapkan bahwa tidak ada bantuan pemerintah biaya gratis untuk melanjutkan sekolah, namun sebenarnya dari pemerintah telah menyediakan bantuan tersebut dengan beberapa syarat, karena komunikasi yang kurang, mengakibatkan masih ada beberapa orang yang belum mengetahuinya.

Masih sama kendala yang dialami oleh TK Intan Wengga Sari. Faktor yang selanjutnya adalah kecenderungan-kecenderungan dalam artian tingkah laku pelaksana kebijakan, Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin sulit. Hal ini ditunjukan oleh beberapa guru pengajar yang menganggap pendidikan sarjana tidak wajib untuk guru TK swasta, padahal tidak mesti swasta maupun negeri karena pada intinya sama-sama bertujuan menciptakan generasi yang lebih baik lagi.

Selain itu menurut pendapat Gow dan Morss mengenai kendal-kendala implementasi, kemudian Islamy menguraikan beberapa kendala implementasi, adapun beberapa kendala yang relevan terkait dengan implementasi PAUD seperti komunikasi dan informasi dimana masih ada yang TK yang tidak mau berurusan dengan pemerintah terkait dengan bantuan yang berasal dari pemerintah. hal ini karena kurangnya komunikasi dan informasi yang diterima oleh pihak lembaga, sehingga

menyebabkan lembaga TK itu sendiri menutup diri dari pemerintah, karena hanya ingin berdiri sendiri. Kendala yang kedua adalah sumber daya manusianya yang tidak memadai, hal ini sesuai dengan temuan peneliti di lapangan, terutama di lembaga TK An-Nisa, masih banyaknya tenaga pendidik yang masih lulusan SMA. Selain tenaga pendidiknya , kepala sekolahnya pun masih lulusan SMA, dalam standar PAUD hal tersebut tidak diperbolehkan karena minimal pendidikan terakhir kepala sekolah adalah D-IV atau S1. Kendala yang ketiga adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai, hal ini tampak nyata di lembaga TK Intan Wengga Sari saat peneliti melakukan pengamatan ke lembaga tersebut sarana prasarana seperti ruang kelas yang kurang menarik didesain sangat kosong, tidak banyak terdapat alat permainan edukatif ,maupun buku-buku. Selain itu alat bermain yang dimiliki hanya 1, diruangan kelas tidak terdapat kursi, dan meja pun jarang dipakai, bahkan lebih sering mengerjakan tugas di lantai, selain itu ruangan kantor, tidak terlihat seperti ruangan kantor pada umumnya, tidak terdapat kursi tamu, profil lembaga, visi misi, dan sebagainya. Kendala seperti kurnagnya bantuan teknis tidak terlalu menjadi kendala karena dari pemerintah sendiri sudah menyediakan bantuan-bantuan seperti biaya pendidikan untuk tenaga pengajar, selai itu bantuan alat permainan, buku-buku, dan bantuan biaya renovasi. Hanya saja tergantung pribadi dari lembaga tersebut yang mau berurusan dengan pemerintah atau tidak terkait pengajuan bantuan tersebut.

Sesuai dengan teori Anderson dalam Agustino (2006:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Program Pendidikan Anak Usia Dini merupakan kebijakan publik yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik dan kependidikan di tiap lembaga yang menjalankan program tersebut. Namun pada nyatanya dibeberapa TK masih ada pelaksana dari kebijakan tersebut yang kurang memperhatikan tujuan dari kebijakan tersebut.

Implementasi Kebijakan dari program PAUD realitanya tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang mengungkapkan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah ataupun swasta. Seperti temuan dilapangan banyaknya yang tidak menyesuaikan dengan standar PAUD dari Permendiknas No.58 tahun 2009.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dari tanggal 2 mei sampai 25 juni 2014 mengenai implementasi program PAUD di Kelurahan Mantuil yang mana mengambil objek penelitian 3 buah lembaga Taman Kanak-Kanak , yaitu TK Intan Wengga Sari yang berakreditasi B, TK Baiturrahman yang berakreditasi C dan TK An-Nisa yang belum terakreditasi. Dari hasil pengamatan, wawancara dan observasi lebih mendalam, diketahui bahwa implementasi program PAUD pada TK yang belum terakreditasi dan berakreditasi cukup, pelaksanaan implementasinya dapat dikatakan cukup baik melihat dari kesesuaian dengan standar-standar dari Permendiknas No.58 Tahun 2009. Hal sebaliknya justru terjadi di TK yang akreditasinya Baik, dari temuan dilapangan lembaga TK tersebut masih banyak yang belum sesuai dengan standar.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program PAUD diantaranya Pertama, kurangnya komunikasi dari pihak lembaga terhadap pemerintah mengenai kekurangan sarana dan prasarana yang dimiliki, kemudian kurangnya informasi yang diberikan pemerintah terhadap lembaga TK yang bersangkutan. Kedua, sumber daya manusia yang kurang memadai dimana masih ada lembaga TK yang tenaga pengajarnya masih lulusan SMA, bahkan ada juga yang kepala sekolahnya masih lulusan SMA, padahal dalam standar PAUD minimal pendidikan kepala sekolah adalah D-IV atau S1. Kendala yang ketiga adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai, salah satunya adalah lembaga TK Intan Wengga Sari, dalam hal belajar mengajar serba terbatas, karena sarana prasarana kurang memadai.

Saran

Adapun beberapa saran dari peneliti agar menjadi masukan bagi pihak terkait dibawah ini :

1. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Bidang PAUD
   a. Menetapkan ketentuan untuk guru-guru pengajar diwajibkan sarjana tidak hanya untuk yang negeri saja tapi juga swasta, karena tujuannya sama-sama mendidik generasi baru yang pastinya menjadi generasi yang lebih baik lagi.
   b. Pemerataan sosialisasi mengenai pentingnya kualifikasi pendidikan untuk guru pendidik di Taman Kanak-Kanak swasta bukan hanya

di Taman Kanak-Kanak Negeri saja.

c. Lebih memperhatikan kesejahteraan guru honor dalam hal tunjangan Dana yang nantinya akan memotivasi para guru honor tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

2. Kepala PAUD Taman Kanak-Kanak
   a. Lebih memperhatikan dalam pengelolaan data lembaga seperti media informasi terkait dengan profil, visi misi dan data lembaga lainnya, kemudian sumber-sumber media belajar untuk kelengkapan belajar murid-murid
   b. Memotivasi tenaga pengajar lainnya dalam hal kualifikasi pendidikan, baik dalam hal dorongan untuk mengikuti pendidikan lagi.
3. Guru Pengajar Taman Kanak-Kanak

   Menyesuaikan dengan ketentuan standar PAUD yang mengharuskan sarjana, karena sekarang pemerintah telah menyediakan bantuan pendidikan tanpa dipungut biaya. Memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah, karena hasilnya tidak hanya berdampak pada diri sendiri namun juga pada murid-murid yang di didik.
4. Masyarakat

   Masyarakat yang dimaksud adalah orangtua murid, berpartisipasi dalam perkembangan anak. Dimana orangtua selalu mengikuti perkembangan anak, dan memanfaatkan sarana dan prasarana lembaga yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agustino, Leo.2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan.

Nasional.2012. Konsep Pengembangan Kurikulum PAUD.Jakarta.

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.2013. Rekap Data PAUD Kota Banjarmasin.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.2012.Petunjuk Teknis Penyelengaraan Taman Kanak-kanak.Jakarta: Balai Pustaka.

Fisip UNLAM.2009. Pedoman Penulisan Skripsi. Banjarmasin: Pustaka Banua.

Nugroho,Riant.2006.Kebijakan. Publik Untuk Negara-negara Berkembang.

Jakarta: PT. Elek media komputindo kelompok gramedia.

_____ .2012.Public Policy, edisi kempat (revisi). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani.2013.Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono.2012.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana.2006.Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi).Jakarta: PT Rineka Cipta.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses (edisi revisi). Yogyakarta: Media pressindo.

Jurnal :

Hasyim, AW., Yayat, S., Nooerhidayah.2009. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Paud. Jurnal Edukasi. Vol.1,No.2,p. 1-12

Internet :

www.banjarmasin.tribunnews.com/2013/10/25/guru-paud-harus-sarjana
(di akses tanggal 12 september 2013)

www.banjarmasin.tribunnews.com/2013/09/18/tragis-5-km-dari-pemko-belum-terjamah-listrik
(diakses tanggal 6 januari 2014)

www.bppnfi-reg4.net/web/index.php/direktorat-pendidikan-anak-usia-dini.html
(diakses tanggal 05 juni 2014)

Perundang-undangan :

Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1, Butir 14

Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini